

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada era ekonomi, daerah diberi wewenang dan tanggung jawab yang besar untuk mengelola sumber-sumber keuangan (desentralisasi administratif) demi kemakmuran rakyat di daerahnya. Desentralisasi administratif tersebut, dimaksudkan untuk mendistribusikan kewenangan, tanggung jawab, dan pengelolaan sumber-sumber keuangan untuk menyediakan pelayanan publik. Kebijakan otonomi daerah pada dasarnya diarahkan untuk mendorong peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam rangka memberikan pelayanan publik kepada masyarakat secara efektif dan efisien.

Akuntansi sektor publik merupakan akuntansi yang dipakai dalam suatu organisasi pemerintah atau lembaga yang tujuannya tidak untuk mendapatkan keuntungan, dan merupakan suatu bagian dari kedisiplinan ilmu. Akuntansi sektor publik memiliki kaitan erat dengan penerapan dan perlakuan akuntansi pada domain publik yang memiliki wilayah lebih luas dan kompleks dibandingkan sektor swasta atau bisnis. Sebagai organisasi publik, pemerintah daerah dituntut agar memiliki kinerja yang berorientasi pada kepentingan masyarakat dengan memberikan pelayanan terbaik secara transparan dan berkualitas. Akuntansi di sektor publik digunakan tidak hanya untuk meminimalisir kecenderungan kecurangan atau penyalahgunaan wewenang tetapi dapat juga meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah, serta pemerintah wajib mempertanggungjawabkan, menyajikan, melaporkan dan mengungkap segala aktivitas dan kegiatan kepada masyarakat, sedangkan transparansi publik pada pemerintah daerah dimaksudkan untuk menyajikan segala informasi kepada masyarakat secara terbuka dan sebenar-benarnya agar dapat dimengerti dan dipantau oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Namun fenomena yang terjadi akhir-akhir ini, terdapat banyak penyimpangan yang berkaitan dengan anggaran di suatu instansi pemerintah. Penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan anggaran daerah kerap terjadi dan muncul ke permukaan sehingga masyarakat seringkali mempertanyakan kinerja pemerintah daerah. Berbagai kasus terkuak ke publik dan terjadi di kota-

kota besar yang mengindikasikan kota-kota lainnya berpotensi pula terjadi penyimpangan tersebut salah satunya di Kota Metro. Perihal yang menjadi sorotan mengenai masalah struktur anggaran yang belum sesuai dengan pedoman penyusunan anggaran seperti belanja modal yang dirancang oleh masing-masing SKPD cukup kecil padahal alokasi belanja modal bisa lebih besar dari yang ditetapkan sehingga berakibat pada program-program SKPD yang kurang inovatif dan monoton.

Permasalahan terkait dengan transparansi penyusunan anggaran diantaranya yaitu proses penyusunan dan penggunaan anggaran yang tidak terbuka ke publik baik itu dari keterangan secara langsung dari instansi terkait maupun dari media sosial resmi pemerintahan kota metro sehingga banyak masyarakat merasa bahwa penggunaan anggaran yang tidak transparan.

Permasalahan lain yang terkait dengan kinerja pemerintah dimulai dengan penyusunan anggaran dengan nilai yang tidak masuk akal jika dikaitkan dengan kondisi sebenarnya yang ada di lapangan dimana hal tersebut terkait permasalahan penyusunan anggaran baik dari segi kejelasan dari sasaran penggunaan anggaran dan ditambah lagi kurangnya pengawasan dari instansi terkait dengan penggunaan anggaran tersebut.

Selama ini sektor publik sering dinilai sebagai sarang inefisiensi, pemborosan, dan sumber kebocoran dana. Dimana setiap SKPD tidak mempunyai kemauan untuk menerapkan prinsip akuntabilitas publik seperti transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, kejelasan sasaran dari anggaran yang diajukan serta kurangnya pengawasan yang terlihat dari kurang akuntabilitas dalam memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya. Pada akhirnya hal tersebutlah yang menyebabkan kinerja pengelolaan keuangan daerah menjadi kurang efektif dan efisien (Setiawan, 2016: 5).

Permasalahan kinerja daerah yang ada di Kota Metro terkait dengan fungsi, tugas dan tanggung jawab dalam menjalankan operasional organisasi yang dinilai sebagian besar terkesan formalitas yang ditunjukkan dengan anggapan masyarakat dimana sebagian besar mereka tidak sesuai dengan harapan mereka mulai dari input sampai dengan impact pembangunan yang tidak menyentuh seluruh lapisan masyarakat dimana hal itu terkait dengan pengelolaan keuangan daerah yang tidak transparan, rendahnya sistem

pengawasan serta sasaran dari penyusunan anggaran yang tidak jelas (Saputra, Kompasiana, 2019)..

Selain faktor di atas yang menjadikan masalah dalam pembuatan anggaran di daerah terus muncul adalah dalam sistem mekanisme pembuatan APBD. Permasalahan terkait pembuatan anggaran di daerah itu karena inkonsistensi yang tidak hanya dilakukan oleh pemerintah daerah. Alhasil, ketika masuk dalam tahap pelaksanaan program tersebut sulit dijalankan serta daya serap anggaran tidak sesuai target (<https://lampung.tribunnews.com>, 2019).

Beberapa penelitian yang terkait dengan fenomena tersebut telah banyak dilakukan. Adiwirya (2015), dalam penelitiannya menunjukkan bahwa transparansi tidak berpengaruh pada kinerja penyusunan RAPBD Kota Denpasar, dan akuntabilitas secara parsial mempengaruhi kinerja penyusunan RAPBD Kabupaten Bireuenen. Berbeda dengan Meutia dan Nurfitriana (2011), yang menunjukkan bahwa hasil penelitian secara simultan variabel akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat, efisiensi dan efektivitas berpengaruh terhadap penyusunan anggaran berbasis kinerja. Secara parsial variabel akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat, efisiensi dan efektivitas juga berpengaruh terhadap penyusunan anggaran berbasis kinerja.

Adiwirya (2015) dalam penelitiannya memperoleh hasil pengujian bahwa secara parsial akuntabilitas dan independensi berpengaruh positif pada kinerja. Hubungan antara pertanggungjawaban dengan kinerja berpengaruh negatif signifikan sedangkan variabel transparansi dan kewajaran tidak berpengaruh terhadap kinerja. Hal lain dengan penelitian Audirya dkk (2013) didapatkan hasil analisis bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan berpengaruh positif pada kinerja pemerintah daerah sedangkan transparansi pengelolaan berpengaruh positif pada kinerja Pemerintah Provinsi Bengkulu.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Pengaruh Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah, Pengawasan Keuangan Daerah, dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Pemerintah Kota Metro”.

B. Perumusan Masalah

Sebelum dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan terkait dengan variabel yang diteliti diantaranya yaitu:

1. Permasalahan terkait dengan transparansi penyusunan anggaran diantaranya yaitu proses penyusunan dan penggunaan anggaran yang tidak terbuka ke publik baik itu dari keterangan secara langsung dari instansi terkait maupun dari media sosial resmi pemerintahan kota metro sehingga banyak masyarakat merasa bahwa penggunaan anggaran yang tidak transparan.
2. Penyusunan nilai anggaran yang tidak masuk akal jika dikaitkan dengan kondisi sebenarnya yang ada di lapangan dimana hal tersebut terkait kejelasan sasaran penggunaan anggaran
3. Kurangnya pengawasan dari instansi terkait dengan penggunaan anggaran tersebut.
4. Permasalahan kinerja daerah yang ada di Kota Metro terkait dengan fungsi, tugas dan tanggung jawab dalam menjalankan operasional organisasi yang dinilai sebagian besar terkesan formalitas

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka masalah pokok dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah transparansi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah?
2. Apakah pengawasan keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah?
3. Apakah kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah?
4. Apakah transparansi pengelolaan keuangan daerah, pengawasan keuangan daerah, dan kejelasan sasaran anggaran berpengaruh secara positif terhadap kinerja pemerintah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas maka tujuan penelitian adalah untuk menguji;

1. Untuk mengetahui pengaruh transparansi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.
2. Untuk mengetahui pengaruh pengawasan keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.
3. Untuk mengetahui pengaruh kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.

4. Untuk mengetahui transparansi pengelolaan keuangan daerah, pengawasan keuangan daerah, dan kejelasan sasaran anggaran berpengaruh secara positif terhadap kinerja pemerintah.

D. Kegunaan Penelitian

1. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat serta menambah wawasan dan meningkatkan pemahaman mengenai akuntansi sektor publik yaitu tentang transparansi pengelolaan keuangan daerah, pengawasan keuangan daerah, dan kejelasan sasaran anggaran dalam akuntabilitas terhadap kinerja pemerintah daerah.

2. Bagi pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam bidang akuntansi sektor publik berkaitan dengan transparansi, pengawasan, dan akuntabilitas dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintah daerah.

3. Bagi pengembang ilmu akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam pengetahuan ilmu akuntansi, khususnya berkaitan dengan transparansi, pengawasan, dan akuntabilitas keuangan daerah dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintah.

4. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumber informasi ataupun sebagai bahan referensi dan juga dapat bermanfaat serta menambah wawasan serta pemahaman tentang bidang pemerintah.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Sifat penelitian : Penelitian kuantitatif
2. Populasi Penelitian : seluruh Pegawai di Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Metro
3. Sampel Penelitian : Pegawai di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Sekretariat DPRD, Perwakilan Dinas Daerah di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Perwakilan Lembaga Teknis Daerah pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.

4. Objek penelitian : transparansi pengelolaan keuangan daerah, pengawasan keuangan daerah, kejelasan sasaran anggaran dan kinerja pemerintah daerah.
5. Tempat penelitian : Kegiatan penelitian ini dilakukan di kantor SKPD pemerintah Kota Metro yang terdiri atas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Sekretariat DPRD, Perwakilan Dinas Daerah di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Perwakilan Lembaga Teknis Daerah pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.